



14%
Angka Stunting

INDONESIA 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

DP3AKB

(DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA)

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 telah selesai.

Rencana Kerja Tahunan ini mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2018 – 2023 (Perubahan).

Rencana Kerja Tahunan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan guna mewujudkan cita cita Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “*LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN*” dengan Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Selong, Januari 2023.

Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Nip. 19661231 198803 1 306

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AKB	8
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	8
2. Program Perlindungan Perempuan	8
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).....	8
4. Program Perlindungan Khusus Anak.....	8
5. Program Pengendalian Penduduk	9
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).....	9
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AKB	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AKB	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Tahun 2023.....	17
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2023	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga” yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana telah diformulasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode 2018-2023. dokumen ini dilengkapi dengan indikator indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2022

Beberapa isu strategis berkembang di Lombok Timur saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2018-2023 diantaranya adalah: 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk; 2) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar untuk pembangunan keluarga; 3) Pembangunan budaya dan karakter bangsa

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No.2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 7. Peraturan Bupati Lombok Timur No 41 Tahun 2001 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tujuan dari penyusunan RKT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.
5. Sebagai acuan DP3AKB dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2023
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3KAB Tahun 2022.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 23 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`
- B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan Khusus Anak

- A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota
- B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Penduduk

- A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
- B. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- B. Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- A. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Upaya Pengarus Utama Gender			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,7%	91,33%	99,60
Sasaran 2 :	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	%	0,035 ‰	0,029 ‰	82,86
Sasaran 3 :	Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Poin	550	556	113
Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0,023 ‰	0,040 ‰	17,39
Sasaran 4 :	Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan GDPK Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,60	1,88	31,09
Sasaran 5 :	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	53,00	51,00	96,23
Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100,00	100,00	100,00

Dalam Pelaksanaan masing-masing program input anggaran dan Realisasi adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.525.000.000	1.524.979.460	99,999
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	9.740.000	9.740.000	100,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota	1.515.260.000	1.515.239.460	99,999
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118.497.000	118.405.000	99,92
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.483.000	56.425.000	99,90
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	62.014.000	61.980.000	99,95
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	15.916.500	12.981.500	81,56
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.916.500	12.981.500	81,56
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	344.520.250	343.521.704	99,71
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	60.246.750	60.242.000	99,99
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.757.750	203.757.750	100,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	80.515.750	79.521.954	98,77
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	205.994.904	194.515.721	94,43
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	11.554.000	9.720.000	84,13
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	194.440.904	184.795.721	95,04
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.448.021.496	7.017.121.760	94,21
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budava Lokal	3.777.437.546	3.601.559.490	95,34
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.342.800	5.342.800	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanoan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.906.251.150	2.655.307.470	91,37

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	758.990.000	754.912.000	99,46
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.135.867.000	5.163.188.351	84,15
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.135.867.000	5.163.188.351	84,15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.090.922.903	7.903.655.940	97,69
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.074.000	3.074.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.687.516.053	7.540.474.014	98,09
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.432.900	11.432.900	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.896.950	267.974.268	97,13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.258.000	16.579.200	96,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.419.000	11.735.500	81,39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.326.000	52.386.058	64,41
	TOTAL	23.884.740.053	22.278.369.436	93,27

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AKB

Analisis atas capaian kinerja DP3AKB Tahun 2022 adalah :

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 65,99¹ dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 56,99 maka dapat dijelaskan bahwa belum terlihat peningkatan atau penurunan indikator dimaksud.

Beberapa faktor penghambat untuk pencapaian target kinerja yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender dan kurangnya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan hal ini terlihat dari persentase OPD yang melakukan analisis PPRG yaitu sebesar 55% dari 40 OPD yang ada. Namun demikian beberapa faktor yang menjadi pendorong upaya peningkatan Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui

¹ Sesuai Rilis BPS tahun 2021, karena Rilis tahun 2022 belum terbit

rencana penerbitan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Perindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terhadap sisa target sampai tahun 2023 sebesar 4,01 dari target yang tertuang di dalam renstra OPD sebesar 70,00 maka beberapa strategis yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Fasilitasi OPD dalam penyusunan dokumen PPRG dan Penyusunan Naskah akademik Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG

Persentase OPD yang sudah melakukan analisis Anggaran Responsif Gender dengan capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 55% dari 40 OPD yang ada di Lombok Timur. Angka tersebut meningkat sebesar 71,13 % dari tahun sebelumnya

Capaian tersebut merupan 86,4 % dari target yang ingin dicapai pada tahun 2022, hal tersebut terkendala oleh kurangnya OPD yang melakuan dan melaporkan kepada DP3AKB terkait analisis ARG yang dilakukan di OPD. Kendala lain adalah mekanisme penyusunan analisi ARG yang belum dilakukan oleh semua unit yang ada di OPD serta terbatasnya sumber daya yang memahami mekanisme penyusunan dokumen PPRG. Namun disisi lain kinerja ini banyak didukung dengan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan dalam penyusunan dokumen PPRG di masing masing OPD yang ada.

Terhadap sisa target sampai tahun 2023 sebesar 15%, diharapkan dapat dicapai dengan semakin memperkuat komitmen dalam penyusunan dokumen PPRG, serta melibatkan beberapa Organisasi Non Pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan.

c. Predikat Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dari Penilaian yang dilakukan pada tahun 2021, pada tahun 2022 Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama, ini merupakan kali pertama Kabupaten Lombok Timur mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak.

Beberapa kendala terkait hasil penilaian Kabupaten Layak Anak adalah tidak tersedianya data dukung yang menjadi pembuktian dukumemn saat dilakukan penilaian Kabupaten Layak Anak, atas hal tersebut beberapa upaya telah dilakukan berupa penguatan koordinasi dengan OPD lain yang terlibat dalam indikator penilaian.

Pada tahun 2023 ditargetkan hasil penilaian Kabupaten Layak anak kategorinya ditargetkan meningkat menjadi Kategori Madya

d. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Capaian kinerja Rasio Kekerasan Terhadap anak pada tahun 2022 adalah sebesar 0,40 ‰ dari 466.185 penduduk usia 0 -18 tahun. Angka ini lebih besar 73,9 % dari target yang diharapkan.

Peningkatan yang terjadi menggambarkan semakin banyaknya Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Salah satu faktor meningkatnya jumlah kasus dilaporkan adalah masih banyaknya pernikahan pada usia anak. Peningkatan kasus dilaporkan juga merupakan gambaran bahwa masyarakat semakin memahami konsep yang dimaksud kekerasan terhadap anak dimana pada masa sebelumnya kejadian serupa dianggap hal wajar. Beberapa upaya untuk menekan angka kejadian Kekerasan terhadap anak yg telah dilakukan adalah dengan menyediakan unit layanan perlindungan Anak yang segera merespon kejadian yang dilaporkan.

Pada tahun 2023 ditarget Rasio Kekerasan Terhadap anak dapat dikurangi hingga ke angka 0,22%. Upaya yang akan dilakukan terkait hal ini adalah menyediakan SDM tersertifikasi untuk melakukan penjangkauan kasus yang dilaporkan, serta penguatan jejaring yang di dilini lapangan tingkat Kecamatan

e. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 1,88% merupakan capaian kinerja sebesar 31,9% dari yang ditargetkan sebesar 0,60 pada tahun 2022.

Terkait upaya menekan laju pertumbuhan penduduk banyak faktor yang mempengaruhi, namun sehubungan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk di DP3AKB maka upaya menekan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Adalah dengan meningkatkan Kesertaan Ber KB bagi Pasangan Usia Subur, serta menggeser Pengguna Aktif KB agar menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang.

Perkawinan di usia lebih awal merupakan faktor penyebab meningkatnya rata rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan karena memiliki periode untuk melahirkannya lebih Panjang. Hal lain yang menjadi penyebab masih tingginya angka kelahiran total adalah angka Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi yang pada tahun 2022 pada angka 25,93 %

f. Persentase Kesertaan Ber-KB terhadap Pasangan Usia Subur

Persentase Kesertaan Ber-KB terhadap PUS pada tahun 2022 sebesar 60,10%, capaian ini merupakan 85,9% dari yang ditargetkan pada tahun 2022. Yaitu sebesar 69,9%.

Hasil kinerja 60,10% merupakan gambaran kesertaan PUS ber-KB secara kuantitas, sisi lain dari kesertaan ber-KB ini yang perlumendapat perhatian adalah kualitas kesertaan ber-KB, yaitu prevalensi penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang lebih berpengaruh terhadap rata rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa suburnya, karena kemungkinan untuk putus metode kontrasepsi lebih kecil.

Kendala yang dialami di lapangan terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait metode kontrasepsi ini, masyarakat masih lebih memilih metode kontrasepsi pil dan suntikan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AKB

Isu-isu penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Belum tercapainya kategori Pratama untuk Kabupaten Layak Anak
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Belum tersedianya Sarana Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Baik Anak Maupun Perempuan.
8. Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
9. Masih rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.
10. Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmetneed) disebabkan karenamasih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
11. Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluargamelalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL).
12. Masih Tingginya angka Stunting maupun Keluarga Beresiko Stunting

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Renstra DP3AKB tahun 2018 – 2023 dan analisis perkembangan dan perkembangan kondisi kebutuhan organisasi pada tahun 2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran kinerja tahun 2023 sebagai berikut

3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Akses Perempuan dalam pembangunan:
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas, Partisipasi, Pengawasan Dan Manfaat Pembangunan Terhadap Perempuan
 - b. Menambah Lembaga Yang Berperan Aktif Untuk Pengarusutamaan Gender
 - c. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
 - d. Meningkatnya Kelembagaan PUG yang aktif
 - e. Meningkatnya perempuan di lembaga legislatif
 - f. Meningkatnya Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.:
 - a. Berkurangnya Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus:
 - a. terwujudnya kabupaten/kota layak anak dengan kategori Pratama
4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak:
 - a. Meningkatnya anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
 - b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

5. Meningkatkan kualitas data gender dan anak, :
 - a. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak di semua perangkat daerah.
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, :
 - a. Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
 - b. Penyediaan Dokumen Grand Desai Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lombok Timur
7. Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) Sasaran yang dicapai dari tujuan ketujuh meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk
8. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, Sasaran yang dicapai dari tujuan kedelapan meliputi sebagai berikut:
 - a. Manurunnya angka Stunting
 - b. Meningkatnya desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana
 - c. Meningkatnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2023 secara rinci sebagaimana pada table berikut

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender 	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
			Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. · Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. · Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. · Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.	
4	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,	Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
			penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak		
			Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. · Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak	
5	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA	
6	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE	
7	Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR)	Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan.	Penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan kesertaan ber-KB difokuskan pada Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi ;peningkatan kualitas SDM ; dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan.	
8	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2023		Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp.(000)	
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,6	91,7	1.057.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelebagaan PUG yang Aktif	%	60	60,5	0	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	%	30	30,2	1.057.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan
	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	‰	0,04	0,035	207.970	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur	%	25	27	74.205	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kasus Perempuan korban Kekerasan	%	-	80	82.665	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	lembaga	0	1	51.100	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Point	-	500,1	6.650	Bidang Perlindungan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak	%	40	40,5	6.650	Bidang Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	‰	0,24	0,23	390.030	Bidang Perlindungan Anak
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Kebijakan	1	1	75.295	Bidang Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	-	80	264.175.000	Bidang Perlindungan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi	Lembaga	0	1	50.560	Bidang Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63	1,88	396.425	Bidang Pengendalian Penduduk
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Progres Kemajuan Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan (GDK) Kab. Lombok Timur	%	25	75	0	Bidang Pengendalian Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Profil Bangsa Kencana Kabupaten Lombok Timur	Dokumen	0	1	396.425	Bidang Pengendalian Penduduk
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Kesertaan KB Aktif	%	69,8	69,9	11.421.837	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Keluarga Yang Terpapar Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana	%	67,8	70	1.185.050	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
		Pendayagunaan Tenaga Penuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan pembinaan program Bangsa Kencana	%	-	100	572.850	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2023		Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp.(000)	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	21,77	30	5.008.937	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana	Ormas	-	3	4.655.000	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	51	53	6.952.055	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif	%	50	60	6.952.055	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga

